

ABSTRAK

Perdagangan manusia di Kamboja telah menjadi isu transnasional yang kompleks dan berdampak signifikan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan *ASEAN convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP-WC) dalam upaya melindungi perempuan dan anak-anak dari praktik perdagangan manusia di Kamboja pada tahun 2020 hingga 2023. Menggunakan teori efektivitas rezim internasional yang dikembangkan oleh Arild Underdal, penelitian ini menyoroti tiga aspek utama: *Problem-solving capacity* rezim, tingkat kolaborasi antarnegara ASEAN, dan kerumitan masalah (*problem malignancy*) yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ACTIP-WC belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Rendahnya kolaborasi antar negara ASEAN akibat prinsip non-intervensi, ketidaksamaan kepentingan nasional, serta lemahnya kapasitas institusi domestik Kamboja dalam penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama dari tidak efektifnya kebijakan ini.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Kamboja, Kebijakan ACTIP, Perempuan dan Anak-anak

ABSTRACT

Human Trafficking in Cambodia has become a complex transnational issue with significant impacts on vulnerable groups, particularly women and children. This study analyzes the effectiveness of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP-WC) in protecting women and children from human trafficking in Cambodia from 2020 to 2023. Using Arild Underdal's theory of international regime effectiveness, this study highlights three main aspects: the regime's problem-solving capacity, the level of collaboration among the ASEAN countries, and the complexity of the problem (problem malignancy) faced. The result of the study shows that the implementation of ACTIP-WC has not yet reached an optimal level of effectiveness. Low levels of collaboration among ASEAN countries due to the principle of non-intervention, differing national interests, and the weak domestic institutional capacity of Cambodia in enforcing the law are the main factors hindering the effectiveness of this policy.

Keywords: *Human Trafficking, Cambodia, ACTIP Policy, Women and Childrens*